

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin

Segala puji bagi Allah penulis panjatkan atas segala keberkahan dan kehendak-Nya hingga penulis dapat menyusun penelitian ini dengan lancar. Usulan Penelitian yang dibahas penulis dengan judul “Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Kredit terhadap Pengendalian Piutang”. Usulan Penelitian ini disusun dengan tujuan pemenuhan salah satu syarat menempuh ujian Sidang Usulan Penelitian pada Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

Dalam setiap aktivitas ataupun kegiatan merupakan hal yang wajar jika mendapatkan suatu kendala. Dalam penyusunan usulan penelitian yang akan penulis bahas mendapat bantuan dan dukungan dari Allah SWT melalui berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan kendala tersebut. Penulis berterimakasih kepada Allah SWT dan pihak-pihak yang Allah berikan untuk membantu kelancaran penyusunan usulan penelitian ini.

Masih terdapat banyak kekurangan yang ada pada diri penulis, karena penulis tidaklah sempurna. Penulis masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan saran agar dapat memperbaiki kesalahan dan melengkapi ketidaksempurnaan yang penulis sadari ataupun tidak disadari. Penulis berharap hasil dari usulan penelitian yang disusun dapat bermanfaat bagi khalayak umum, khususnya bagi penulis sendiri.

Terimakasih

Bandung, Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Teoritis	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM)	15
2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi	16
2.1.3 Sistem Akuntansi Kredit	26
2.1.4 Pengendalian Piutang	28
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.3 Hipotesis	42
2.4 Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Objek Penelitian	45
3.2 Metode Penelitian.....	45

3.2.1	Desain Penelitian	45
3.2.2	Populasi dan Sampel Penelitian	46
3.2.3	Definisi dan Operasionalisasi Variabel	48
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	50
3.2.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
3.2.6	Pengujian Hipotesis	54
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN		58
4.1	Temuan Penelitian	58
4.1.1	Tinjauan Umum Penelitian.....	58
4.1.2	Deskripsi Data Variabel Penelitian	63
4.2	Pembahasan Temuan Penelitian	76
4.2.1	Analisis Data	76
4.2.2	Uji Validitas Item dan Reliabilitas Instrumen	77
4.2.3	Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Kredit terhadap Pengendalian Piutang pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Bandung	80
4.2.4	Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Kredit terhadap Pengendalian Piutang pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Bandung.....	82
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		85
5.1.	Simpulan.....	85
5.2.	Rekomendasi	85
DAFTAR PUSTAKA		87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rata-Rata Tingkat Bunga dan Nilai Kredit.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1 Daftar Koperasi Simpan Pinjam di Kota Bandung.....	46
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	49
Tabel 3.3 Kriteria Pencapaian	53
Tabel 3.4 Interpretasi Indeks Korelasi.....	55
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	59
Tabel 4.2 Sampel Penelitian.....	60
Tabel 4.3 Karakteristik Responden.....	61
Tabel 4.4 Deskripsi Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Kredit (X)	63
Tabel 4.5 Nilai (Skor) Kinerja.....	64
Tabel 4.6 Nilai (Skor) Informasi.....	65
Tabel 4.7 Nilai (Skor) Ekonomis.	66
Tabel 4.8 Nilai (Skor) Kontrol.	67
Tabel 4.9 Nilai (Skor) Efisiensi.	67
Tabel 4.10 Nilai (Skor) Pelayanan.....	69
Tabel 4.11 Deskripsi Pengendalian Piutang (Y)	69
Tabel 4.12 Nilai (Skor) Otoritas atas Transaksi.....	70
Tabel 4.13 Nilai (Skor) Pemisahan Fungsi dan Tugas.....	71
Tabel 4.14 Nilai (Skor) Dokumentasi dan Pencatatan.....	71
Tabel 4.15 Nilai (Skor) Pengendalian atas Penggunaan Aktiva)	73
Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas X (Sistem Informasi Akuntansi Kredit)	77
Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas Y (Pengendalian Piutang)	78
Tabel 4.18 Hasil Uji Reliabilitas Variabel.....	79
Tabel 4.19 Skor Total X terhadap Y.....	80
Tabel 4.20 Hasil Uji Korelasi.....	81

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Koperasi di Indonesia.....	2
Grafik 1.2 Persentase Koperasi Simpan Pinjam Menurut Tingkatannya.....	3
Grafik 1.3 Rata-Rata Posisi Tabungan, Deposito dan Pinjaman.....	4
Grafik 1.4 Persentase Menurut Sistem Pengembalian Pinjaman.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan kompetisi global dalam dunia bisnis, sistem informasi dan teknologi menjadi alat yang digunakan oleh perusahaan untuk membantu kegiatan operasional serta memperbaiki efisiensi dari kegiatan perusahaan. Perkembangan teknologi telah dianggap berhasil memimpin globalisasi pasar dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu peran teknologi dalam mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan adalah penggunaan komputer. Komputer dianggap sebagai alat yang dapat meningkatkan penggunaan informasi, menganalisis data dalam jumlah besar dan menghasilkan laporan secara akurat dan tepat waktu.

Beberapa tahun yang lalu, peran sistem informasi akuntansi hanya berfokus pada aktivitas jurnal berbasis kertas serta proses mencatat di buku besar (*ledger*) yang dilakukan secara manual oleh karyawan. Seiring perkembangan teknologi saat ini hampir seluruh organisasi menggunakan sistem komputer untuk melakukan pencatatan dalam sistem informasi akuntansinya (Leslie Turner, Andrea B. Weickgenannt, 2017, hlm. 4), termasuk perusahaan atau badan usaha yang melakukan transaksi secara kredit. Transaksi secara kredit dilakukan badan usaha agar mampu menarik minat debitur dan merupakan strategi yang dilakukan oleh banyak pelaku usaha untuk merebut pangsa pasar. Salah satu alasan inilah yang menjadikan sebagian besar aktivitas bisnis dilakukan secara kredit (Hall, 2010, hlm. 44).

Transaksi kredit menyebabkan munculnya pos piutang dagang atau piutang. Piutang tidak selamanya berjalan mulus, bahkan tidak jarang terjadi kemacetan dan berakibat pada munculnya pos piutang yang tak tertagih. Berdasarkan hasil penelitian Noviasari (2016) ditemukan bahwa piutang yang lambat dalam penerimaannya atau tidak dapat ditagih menyebabkan terganggunya *cash flow* yaitu penerimaan kas yang

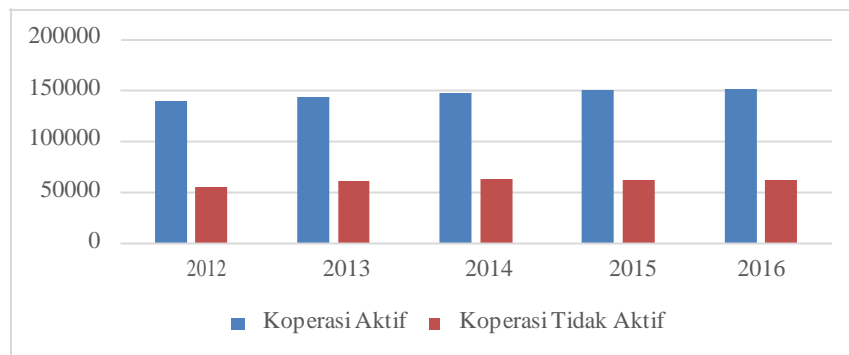
terhambat. Hal ini berakibat pada kesulitan perusahaan dalam mengeluarkan kas untuk pembiayaan operasional perusahaan bahkan proses pembiayaan, dimana lembaga keuangan non-bank memiliki kegiatan utama yaitu pemberian kredit untuk pembiayaan barang modal. Kerugian lain yang dapat ditimbulkan adalah keterlambatan debitur dalam membayar hutang kepada perusahaan, menurunnya aktivitas *receivable turnover* dan berkurangnya keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, suatu badan usaha harus memiliki sistem informasi akuntansi yang memadai agar manajemen mampu memantau setiap aktivitas termasuk pos-pos pendapatan dan piutang.

Badan usaha yang mengandalkan pos piutang salah satunya adalah koperasi. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap koperasi menyebabkan banyak kegiatan ekonomi terjadi di dalam koperasi tersebut. Seiring dengan banyaknya kegiatan dan transaksi, maka secara tidak langsung sistem informasi akuntansi yang dulunya manual pun beralih dengan penggunaan komputer. Hal ini guna mempermudah koperasi dalam melakukan proses input data yang kemudian diolah dan menghasilkan output data berupa sistem informasi.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No 25 Tahun 1992). Peran koperasi di Indonesia menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi karena dalam aktivitasnya koperasi menjalankan prinsip ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menuntaskan kemiskinan (Hendar 2011, hlm. 2).

Grafik 1.1

Pertumbuhan Koperasi di Indonesia

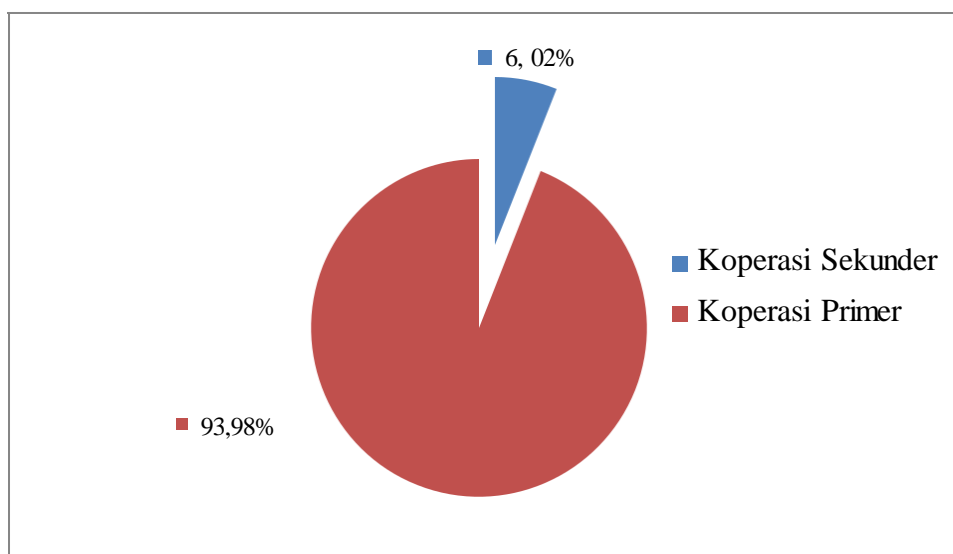


Sumber: (Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia)

Pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan pinjam (Sitio dan Halomoan 2001). Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk atau wadah koperasi simpan pinjam anggota untuk tetap dapat berproduksi. Berdasarkan tingkatannya, koperasi dibedakan menjadi dua jenis, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dapat dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 (dua puluh) orang. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Hasil survei BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa dari seluruh koperasi simpan pinjam yang merespon, 93,98 persen merupakan koperasi primer, sedangkan sisanya 6,02 persen merupakan koperasi sekunder.

Grafik 1.2

Persentase Koperasi Simpan Pinjam Menurut Tingkatannya

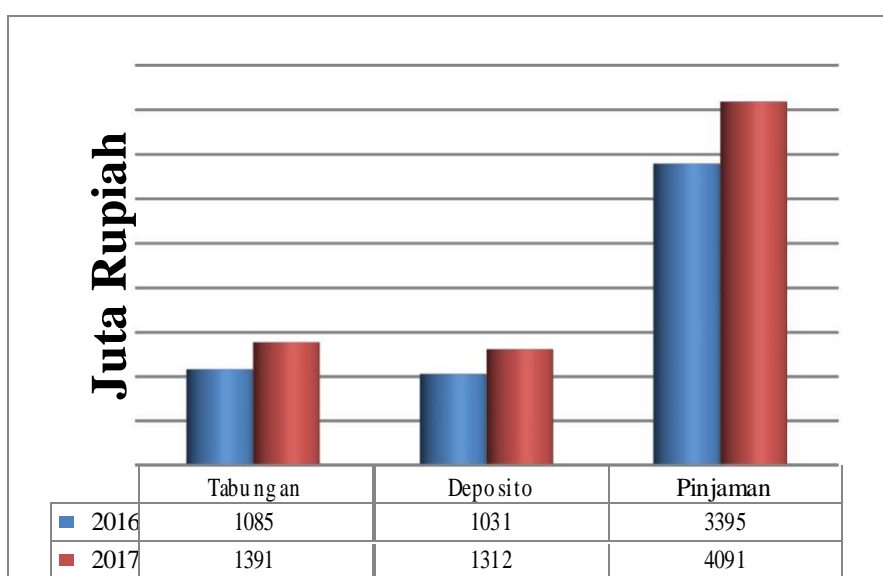


Sumber: (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia)

Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menerima simpanan dari anggota dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Rata-rata nilai tabungan dan deposito anggota pada koperasi simpan pinjam selama tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, seperti yang terlihat pada grafik berikut

Grafik 1.3

Rata-Rata Posisi Tabungan, Deposito dan Pinjaman yang Diberikan oleh Koperasi



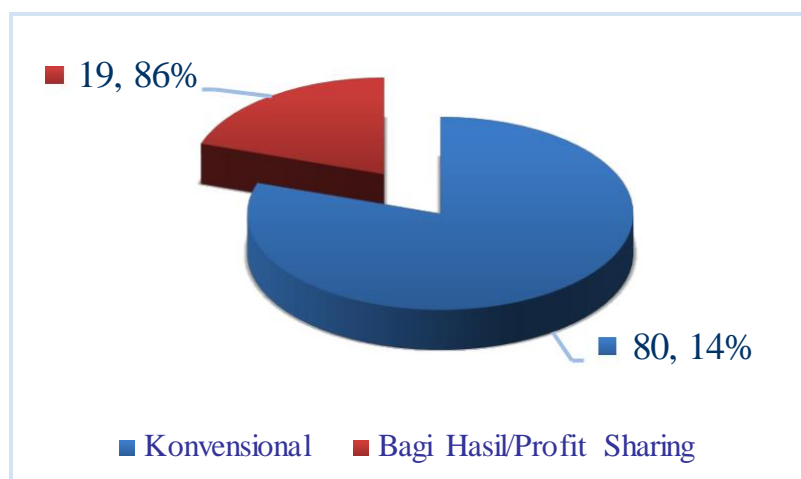
Sumber: (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia)

Rata-rata nilai tabungan naik 28,20 persen menjadi 1,39 miliar rupiah. Sedangkan rata-rata nilai deposito naik sebesar 27,26 persen menjadi 1,31 miliar rupiah. Sementara itu, nilai pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi simpan pinjam selama 2017 rata-rata sebesar 4,09 miliar rupiah. Nilai tersebut naik sebesar 20,50 persen dari tahun 2016.

Sistem pengembalian pinjaman pada koperasi simpan pinjam dibagi menjadi dua macam, yaitu secara bagi hasil dan secara konvensional, seperti yang ditunjukkan pada grafik 1.4. Dari seluruh koperasi simpan pinjam yang merespon, sebesar 80,14 persen koperasi menerapkan sistem pengembalian pinjaman secara konvensional, yakni dengan bunga pinjaman. Dalam penentuan tingkat bunga pinjaman pada koperasi simpan pinjam dikenal dua metode. Metode pertama adalah tingkat bunga tetap, sedangkan metode kedua adalah tingkat bunga menurun.

Grafik 1.4

Persentase Koperasi Simpan Pinjam Menurut Sistem Pengembalian Pinjaman



Sumber: (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia)

Koperasi simpan pinjam yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia rata-rata menerapkan kedua metode tersebut. Rata-rata tingkat bunga tetap berkisar antara 0,88 persen sampai 5,61 persen per bulan. Sedangkan rata-rata tingkat bunga menurun berkisar antara 0,06 persen sampai 2,09 persen seperti yang dijelaskan di tabel 1.1.

Tabel 1.1

Rata-Rata Tingkat Bunga dan Nilai Kredit Koperasi Simpan Pinjam, 2017

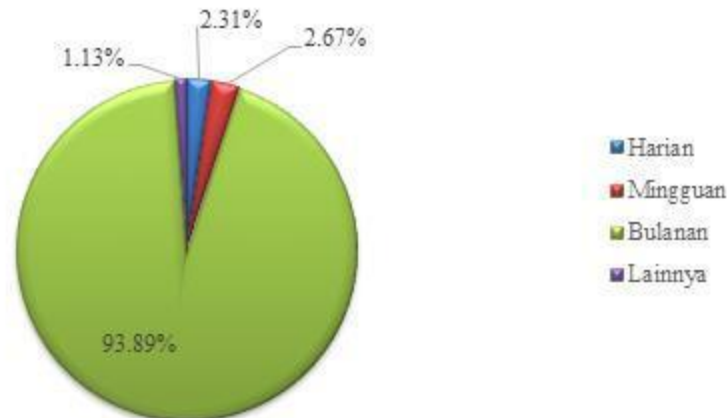
Provinsi	Jenis Tingkat Bunga (persen)		Nilai Kredit (Juta Rupiah)
	Tetap	Menurun	
Aceh	1.92	0.35	1314
Sumatera Utara	1.24	0.71	4536
Sumatera Barat	1.6	0.06	3 199
Riau	2.62	0.37	2 100
Jambi	3.39	0.82	1293
Sumatera Selatan	5.61	0.6	3 816
Bengkulu	1.41	0.11	1220
Lampung	1.56	0.43	2 918
Bangka Belitung	2.63	0.49	1834
Kepulauan Riau	4.26	1.78	3550
DKI Jakarta	2.5	1.56	17756
Jawa Barat	2.03	0.91	3681
Jawa Tengah	1.37	0.66	5608
DIY Yogyakarta	2	0.6	3104
Jawa Timur	1.83	0.57	2099

Banten	2.66	0.69	6617
Bali	0.88	2.09	3789
NTB	1.13	0.54	1627
NTT	0.92	0.92	3219
Kalimantan Barat	2.05	0.62	8161
Kalimantan Tengah	1.5	0.79	2900
Kalimantan Selatan	1.57	0.79	1273
Kalimantan Timur	1.97	0.07	6605
Kalimantan Utara	2.95	0	167
Sulawesi Utara	4.32	1.71	1253
Sulawesi Tengah	1.43	0.77	1181
Sulawesi Selatan	1.38	0.46	19084
Sulawesi Tenggara	1.55	0.38	803
Gorontalo	2.19	0.48	685
Sulawesi Barat	1.37	0.53	1252
Maluku	1.86	1.01	2 048
Maluku Utara	3.78	0.53	1064
Papua Barat	2.52	0.6	947
Papua	1	0.87	2033

Dilihat dari periode pengembalian angsurannya, pada grafik 1.5, diketahui bahwa sebesar 93,89 persen koperasi simpan pinjam menerapkan periode pengembalian angsuran secara bulanan.

Grafik 1.5

Persentase Koperasi Simpan Pinjam Menurut Pengembalian Periode Angsuran



Sumber: (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia)

Sebesar 2,67 persen koperasi simpan pinjam menerapkan periode pengembalian angsuran secara mingguan, dan sebanyak 2,31 persen koperasi simpan pinjam menerapkan periode pengembalian angsuran secara harian. Untuk mampu berpengaruh sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, koperasi melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin untuk mengurangi adanya resiko kredit macet. Sistem operasional badan usaha seperti ini tentunya tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi dapat menimbulkan piutang dan akan terjadi aliran kas masuk (*Cash In Flow*) saat hari jatuh temponya.

Kegiatan tersebut memiliki resiko piutang tak tertagih dalam kegiatan operasionalnya, mengingat banyak debitur yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran atau mengalami kemacetan dalam pembayarannya. Menurut Wahyuni (2012) piutang tak tertagih adalah hak untuk menagih sejumlah uang dari penjual kepada pembeli karena adanya transaksi penjualan secara kredit yang belum atau tidak bisa dibayarkan tepat pada waktunya. Sementara menurut Jusup (2011, hlm. 55) piutang tak tertagih adalah piutang yang dapat menimbulkan kerugian karena debitur tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Tingginya resiko piutang tak tertagih menyebabkan suatu badan usaha memprioritaskan sistem akuntansi terutama hal-hal yang menyangkut struktur pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi salah saji dalam penyediaan informasi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memroses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan (Diana, 2011, hlm.4). Sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat melihat laporan keuangan setiap saat dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu sistem informasi akuntansi juga dibuat dengan tujuan untuk mengontrol atau mengendalikan aktivitas penjualan. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas penjualan yang memiliki potensi untuk menimbulkan kesalahan pada sistem serta potensi kecurangan yang disengaja akibat kelemahan sistem itu sendiri.

Beberapa transaksi finansial yang tercatat dalam dokumen dikomunikasikan melalui sistem informasi akuntansi dengan tujuan untuk menghasilkan informasi kepada pemegang kepentingan melalui laporan. Informasi yang bisa tersampaikan dengan baik dapat dipertimbangkan dalam berbagai hal, diantaranya perencanaan, koordinasi dan evaluasi. Evaluasi dapat memungkinkan kontrol pihak manajemen dalam mengendalikan piutang sebagaimana hasil penelitian Ali Nurdin Siregar (2016) yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektifitas pengendalian piutang. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu sistem usaha yang menerapkan pinjaman kredit termasuk koperasi.

Sistem informasi akuntansi kredit berawal dari permohonan pinjaman dan berakhir saat kas diterima dari hasil pelunasan hutang oleh debitur. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, diharapkan aktivitas operasional koperasi dapat berjalan dengan baik, dapat memberikan informasi kepada anggota dan pengelola tentang prospek dan kelangsungan koperasi di masa mendatang, dan juga dapat membantu peningkatan efektivitas pengendalian internal piutang. Salah satu yang termasuk ke dalam pos pengendalian internal piutang diantaranya ada pada pos piutang tak tertagih. Sebagaimana hasil penelitian Robi Maulana (2016) yang

menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap efektivitas kolektibilitas piutang yang tak tertagih.

Rasio kredit macet bermasalah atau biasa disebut dengan *non-performing loan* (NPL) untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada awal 2019 mengalami peningkatan. Pada Januari 2019 angka NPL di sektor ini mencapai 3,79%, angka ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2018 yang tercatat 3,44%. Menurut Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Ita Rulina, kenaikan NPL UMKM ini dibarengi dengan peningkatan kredit di sektor tersebut. Hal ini berbanding linear dengan peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu penyumbang yang memberi kontribusi pada penyaluran KUR tersebut ialah koperasi dengan nilai capaian Rp. 117 juta. Sedangkan jumlah UMKM yang mengakses pembiayaan melalui usaha mikro anggota koperasi dengan akses pembiayaan Kredit Ultra Mikro adalah sebesar 102.054 orang, seperti yang terlansir di Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2018.

Adanya peningkatan jumlah kredit menunjukkan beberapa badan usaha dalam beberapa tahun terakhir ini belum mampu melakukan langkah-langkah nyata untuk mengendalikan piutangnya seperti yang dikemukakan di Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2018. Pertumbuhan kuantitas koperasi tidak diimbangi dengan pertumbuhan kualitas yang baik sehingga banyak koperasi yang pasif karena tidak dapat melakukan pengendalian atas kondisi keuangannya. Dalam rangka mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah mengeluarkan kebijakan Reformasi Koperasi yang telah dimulai dari tahun 2015. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian koperasi agar kualitas koperasi menjadi hal yang utama dan bukan lagi tentang kuantitas.

Koperasi di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh secara bertahap serta meningkatkan efisiensi agar sejajar dengan para pesaing swasta dan (lembaga) ekonomi pemerintah

lainnya. Perlu satu sistem dan pengendalian internal sebagai solusi untuk badan usaha koperasi agar dapat mencapai titik yang sejajar. (Ropke dan Djatnika, 2012). Pengendalian internal adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan guna mengawasi dan menjaga aset perusahaan terutama dalam pengendalian kredit dan piutang (Mulyadi, 2013).

Efektivitas pengendalian kredit menyita perhatian lebih untuk dilakukannya prosedur pemberian kredit yang ketat, sebab hal tersebut dapat berhubungan langsung dengan pengendalian piutang yang menjadi faktor penting dalam kegiatan operasional suatu badan usaha. Setiap informasi yang ada mengenai lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, serta monitoring yang dikomunikasikan oleh staf dan manajemen dalam *meeting* dapat meningkatkan pengendalian internal piutang (Wuisan, 2013). Hal ini memberi navigasi atau arah terhadap badan usaha dalam menerapkan sistem informasi sebagai langkah kehati-hatian untuk mengendalikan piutang yang dilakukan oleh bagian internal.

Seperti yang dilansir pada **Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2018**; permasalahan utama yang dihadapi koperasi secara ringkas meliputi aspek organisasi, usaha, SDM, sistem pendukung dan iklim usaha. Pada masing-masing aspek tersebut memiliki permasalahan beragam, seperti rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengakses teknologi informasi, kurangnya jangkauan penyuluhan dan diklat perkoperasian dan tata kelola laporan keuangan dalam koperasi yang tidak adaptif mengikuti perkembangan era digital. Era dimana teknologi berkembang secara pesat, mulai dari alat komunikasi, internet atau semua hal yang membantu pekerjaan manusia. Dengan dukungan sistem, kegiatan koperasi dalam melakukan konsolidasi, memberikan informasi kepada anggota, menjadi tempat alternatif menarik untuk mempromosikan produknya dan mengefektifkan anggota dalam kegiatan simpan pinjam terutama ketika terjadi pemberian kredit.

Koperasi simpan pinjam memiliki kegiatan menerima simpanan dari anggota dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkannya kembali dalam

bentuk pinjaman kepada anggotanya sebagaimana yang dimaksud dalam **Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015**. Koperasi simpan pinjam memiliki resiko piutang tak tertagih dalam kegiatan operasionalnya mengingat banyak debitur yang tidak tepat waktu dalam pembayaran angsuran atau mengalami kemacetan dalam pembayaran.

Penelitian Wahyuni (2012) menyatakan bahwa piutang tak tertagih adalah hak untuk menagih sejumlah uang karena adanya transaksi secara kredit yang belum atau tidak bisa dibayarkan tepat pada waktunya. Adanya piutang tak tertagih ini tentu menuntut badan usaha untuk dapat mengendalikan piutangnya. Menurut Mulyadi (2011, hlm. 183) pengendalian piutang adalah serangkaian kebijakan penerapan sistem prosedur yang digunakan oleh manajemen dan mengawasi aktivitas yang terjadi di perusahaan.

Pengelolaan piutang menjadi unsur penting dalam aktivitas operasional koperasi, sebab menurut Horngren, Jr., & Oliver (2011, hlm. 407) jika suatu badan usaha tidak mampu menagih piutang dari pelanggan atau debitur, maka akan tercipta beban piutang yang tak tertagih. Resiko kredit macet dapat menimbulkan kerugian bagi entitas usaha. Tingginya resiko piutang tak tertagih pada aktivitas peminjaman di koperasi menyebabkan koperasi memprioritaskan sistem akuntansi terutama untuk mencegah dan mendeteksi salah saji.

Hasil penelitian sebelumnya juga mendukung kaitan antara sistem informasi akuntansi dengan pengendalian piutang diantaranya Ali Nurdin Siregar (2016) yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektifitas pengendalian piutang di Perusahaan Metro Padangsidempuan pada tahun anggaran 2014. Robi Maulana (2016) menyimpulkan hal yang sama yaitu sistem informasi akuntansi penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas kolektibilitas piutang tak tertagih. Sementara hasil penelitian Susri Rachmawati (2013) menyimpulkan bahwa Efektivitas Pengendalian Piutang dapat tercapai dengan bantuan sistem informasi akuntansi pada PT. Permata Finance Samarinda dan sistem informasi akuntansi penjualan berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian piutang. Untuk menunjang pengendalian internal piutang,

maka perlu suatu sistem dan prosedur pemberian kredit yang handal. Sehingga sistem informasi akuntansi kredit memiliki pengaruh terhadap pengendalian piutang koperasi simpan pinjam di kota Bandung.

Berdasarkan uraian di atas, sistem yang sudah baik dan jelas dapat mempermudah pengelolaan piutang dengan meminimalisasi dampak buruk dari debitur yang menghasilkan piutang tidak tertagih. Bila piutang dapat tertagih atau kembali secara tepat waktu tanpa hambatan apapun maka tingkat kolektibilitas piutang pun dapat tinggi. Demikian sebaliknya, bila koperasi tidak memiliki pengendalian internal yang baik dan jelas, maka akan menghasilkan dampak buruk pada pengelolaan piutangnya, karena piutang tak tertagih dapat menurunkan tingkat kolektibilitas. Berlaku dengan syarat, koperasi tersebut memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki dasar-dasar integritas dan nilai-nilai etis.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik mengevaluasi penerapan sistem informasi akuntansi pemberian kredit dan piutang. Namun karena sistem informasi akuntansi biasa diciptakan di lingkungan perusahaan besar yang sudah terbiasa dengan penerapan teknologi dalam pengelolaan transaksinya, penulis ingin melakukan penelitian atas penerapan sistem informasi akuntansi pemberian kredit dan piutang di lingkup koperasi. Mengetahui latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul "**PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KREDIT TERHADAP PENGENDALIAN PIUTANG**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah efektivitas sistem informasi akuntansi kredit berpengaruh terhadap pengendalian piutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas sitem informasi akuntansi kredit terhadap pengendalian piutang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis bidang kajian efektivitas sistem informasi akuntansi kredit dan dapat menjadi tambahan literatur pengembangan keilmuan bidang sistem informasi akuntansi kredit dan pengendalian piutang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan yaitu:

- a. Bagi emiten, memberikan informasi bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi kredit yang berpengaruh terhadap pengendalian piutang sehingga penelitian ini mampu menjadi referensi dalam pertimbangan pengambilan keputusan oleh anggota koperasi agar dapat meningkatkan pengendalian piutang.
- b. Bagi regulator, memberikan referensi dalam penerapan manajemen keuangan yang baik pada koperasi dalam rangka pengendalian piutang dan dapat meminimalisir adanya piutang tak tertagih, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan debitur.